

**ANALISIS PENDAPATAN DAN BELANJA DESA (STUDI
KASUS PADA KANTOR DESA BIJI NANGKA
KECAMATAN SINJAI BORONG)**

SKRIPSI

Oleh

SUNARTI

NIM 105721113816



**Program Studi Manajemen
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH
MAKASSAR**

2020

**ANALISIS PENDAPATAN DAN BELANJA DESA (STUDI
KASUS PADA KANTOR DESA BIJI NANGKA
KECAMATAN SINJAI BORONG)**

SKRIPSI

Oleh

SUNARTI

105721113816

*Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar
Sarjana Ekonomi Manajemen Pada Universitas Muhammadiyah*

Makassar

**Program Studi Manajemen
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH**

MAKASSAR

2020

11/12/2020

1 ecp
Smb. Alumni

R/0263/MAN/2020
SUN
a'

MOTTO HIDUP

Tidak ada yang paling indah seindah lantunan Al-Qur'an dan As-Sunnah

"Maka sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan".

(QS. Al-Insyirah: 5-6)

Dari Abu Hurairah, Rasulullah Sallallahu 'Alaihi Wasallam Bersabda: "Sesungguhnya dunia dan apa yang ada didalamnya adalah Hina. Kecuali dzikir kepada Allah dan apa-apa yang membawa orang kepada dzikir dan orang Berilmu atau orang yang belajar".

(HR.Tirmidsi)

"Demi masa. Sungguh manusia berada dalam kerugian, kecuali orang-orang yang Beriman dan mengerjakan kebajikan serta saling Menasehati untuk Kesabaran".

(QS. Al-Asr: 1-3)

PERSEMBAHAN

Karya ilmiah ini kupersembahkan sebagai tanda baktiku kepada kedua orang tuaku tercinta yang selalu berdoa demi kesuksesan anaknya yang menjadi penyemangat dikala rasa putus asa mulai muncul serta bingkisan sayang buat kakakku tercinta, adikku tercinta, keluarga besarku, dan sahabatku serta orang-orang yang selalu menyayangiku.



**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR**

Jl. Sultan Alauddin No. 259 Gedung Iqra Lt. 7 Telp. (0411) 866972 Makassar

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

HALAMAN PERSETUJUAN

Judul : Analisis Pendapatan dan Belanja Desa (Studi Kasus Pada Kantor Desa Biji Nangka Kecamatan Sinjai Borong)
Nama Mahasiswa : SUNARTI
No. Stambuk/NIM : 105721113816
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis
Perguruan Tinggi : Universitas Muhammadiyah Makassar

Menyatakan bahwa penelitian ini telah diteliti, diperiksa didepan panitia penguji Ujian Skripsi Strata Satu (S1) pada tanggal 05 Desember 2020 di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar.

Makassar, 05 Desember 2020

Menyetujui,

Pembimbing I

Pembimbing II


Dr. Akhmad, S.E., M.Si
NIDN : 0031126521


Firman Syah, S.E., M.M
NIDN : 0917119003

Mengetahui,


Ismail Rasulong, S.E., M.M
NBM: 903 078


Muh. Nur Rasyid, S.E., M.M.
NBM: 108 5576



**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR**

Jl. Sultan Alauddin No. 259 Gedung Iqra Lt. 7 Telp. (0411) 866972 Makassar

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi atas Nama Sunarti, NIM : 105721113816, diterima dan disahkan oleh Panitia Ujian Skripsi berdasarkan Surat Keputusan Rektor Universitas Muhammadiyah Makassar Nomor: 0013/SK-Y/61201/091004/2020 M, Tanggal 20 rabi'ul akhir 1442 H / 05 Desember 2020 M, sebagai salah satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana Manajemen pada Program Studi Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar.

20 Rabi'ul Akhir 1442 H
Makassar, _____
05 Desember 2020 M

PANITIA UJIAN

1. Pengawas Umum : Prof. Dr. H. Ambo Asse, M., Ag. (.....)
(Rektor Unismuh Makassar)
2. Ketua : Ismail Rasulong, SE., MM. (.....)
(Dekan Fak. Ekonomi dan Bisnis)
3. Sekretaris : Dr. Agus Salim HR, SE., MM. (.....)
(WD 1 Fak. Ekonomi dan Bisnis)
4. Penguji : 1. Edi Jusriadi, SE., MM. (.....)
2. Asri Jaya, SE., MM (.....)
3. Dr. Hj. Ruliaty, MM (.....)
4. Firman Syah, SE., MM (.....)

Disahkan Oleh
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Muhammadiyah Makassar

Ismail Rasulong, SE., MM
NBM. 903 078



FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR

Jl. Sultan Alauddin No. 259 Gedung Iqra Lt. 7 Telp. (0411) 866972 Makassar

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama Mahasiswa : SUNARTI
Stambuk : 105721113816
Program studi : Manajemen
Dengan Judul : Analisis Pendapatan dan Belanja Desa (Studi Kasus
Pada Kantor Desa Biji Nangka Kecamatan Sinjai Borong)

Dengan ini menyatakan bahwa :

Skripsi yang saya ajukan di depan tim penguji adalah ASLI hasil karya sendiri, bukan hasil jiplakan dan tidak dibuat oleh siapapun.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan saya bersedia menerima sanksi apabila pernyataan ini tidak benar.

Makassar, 05 Desember 2020

Yang Membuat Pernyataan :

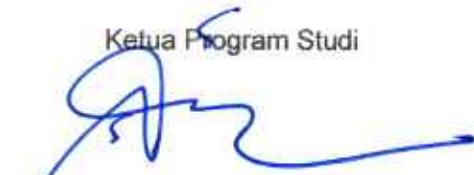


Diketahui Oleh,

Dekan Fakultas Ekonomi


Ismail Rasufong, SE., MM.
NBM. 903078

Ketua Program Studi


Muh. Nur Rasyid, SE., MM.
NBM : 1085576

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Syukur alhamdulillah penulis panjatkan kehadiran Allah SWT. atas segala rahmat dan hidayah yang tiada henti diberikan kepada hamba-Nya. Shalawat dan salam tak lupa penulis kirimkan kepada Rasulullah Muhammad SAW Beserta para keluarga, sahabat dan para pengikutnya. Merupakan nikmat yang tiada ternilai manakala penulisan skripsi yang berjudul "Analisis Pendapatan dan Belanja Desa Studi kasus pada Kantor Desa Biji Nangka Kecamatan Sinjai Borong".

Skripsi yang penulis buat ini bertujuan untuk memenuhi syarat dalam menyelesaikan Program Sarjana (S1) pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar.

Teristimewa dan terutama penulis sampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada ayahanda dan ibunda, karena tanpa bantuan dan motivasi dari Ayahanda (Bahri) dan Ibunda (Hj. Nur Hayati) tercinta yang senantiasa memberi harapan, semangat, perhatian, kasih sayang dan doa tulus tanpa pamrih. Serta Kakakku dan Adikku tersayang (kakak Yusuf, kakak Yunus, kakak Ita, kakak Susi dan adik Lili) yang senantiasa mendukung dan memberikan semangat hingga akhir studi ini. Dan seluruh keluarga besar terima kasih atas segala pengorbanan, dukungan dan restu yang telah diberikan demi keberhasilan penulis dalam menuntut ilmu, Semoga apa yang telah mereka berikan kepada penulis menjadi ibadah dan cahaya penerang kehidupan di dunia dan akhirat.

Penulis menyadari bahwa penyusunan skripsi ini tidak akan terwujud tanpa adanya bantuan dari dorongan berbagai pihak. Begitu pula penghargaan yang setinggi-tingginya dan terima kasih banyak disampaikan dengan hormat kepada:

1. Tuhan Yang Maha Esa, atas berkat dan karunia yang diberikan sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik.
2. Bapak Prof. Dr. H. Ambo Asse, M. Ag., Rektor Universitas Muhammadiyah Makassar.
3. Bapak Ismail Rasulong SE., MM., Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar.
4. Bapak Muh Nur Rasyid, SE., MM., selaku ketua Program Studi Manajemen Universitas Muhammadiyah Makassar.
5. Bapak Dr. Akhmad, SE., M.Si., selaku Pembimbing I yang telah membantu serta membimbing penulis dalam menyelesaikan skripsi.
6. Bapak Firman Syah, SE., MM., selaku Pembimbing II yang telah membantu serta membimbing penulis dalam menyelesaikan skripsi.
7. Bapak/Ibu dan Asisten Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar yang tak kenal lelah banyak menuangkan ilmunya kepada penulis selama mengikuti kuliah.
8. Segenap Staf dan Karyawan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar.
9. Rekan-rekan mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Program Studi Manajemen Angkatan 2016 terkhusus kelas Manajemen 16 D yang selalu belajar bersama yang tidak sedikit bantuannya dan dorongan dalam aktivitas studi penulis.

10. Kepala Desa Biji Nangka, segenap Staf dan Karyawan yang telah memberikan izin meneliti sehingga penulis dapat menyelesaikan penelitian dengan baik.

11. Teruntuk sahabat saya Sartika Muslimawati dan Nurul Winda Sari yang selalu serta menemani dan memberikan semangat selama proses penyusunan skripsi ini.

12. Teruntuk kakak sekaligus partner Asriadi yang selalu setia membantu dan mensupport saya selama proses penyusunan skripsi ini.

13. Terima Kasih untuk semua kerabat yang tidak bisa penulis sebut satu persatu yang telah memberikan semangat, kesabaran, motivasi dan dukungannya sehingga penulis dapat merampungkan penulisan skripsi ini.

Sungguh penulis sangat menyadari bahwa skripsi ini masih sangat jauh dari kata sempurna oleh karena itu, kepada semua pihak utamanya para pembaca yang budiman, penulis senantiasa mengharapkan saran dan kritiknya demi kesempurnaan skripsi ini.

Mudah-mudahan skripsi yang sederhana ini dapat bermanfaat bagi semua pihak utamanya kepada Almamater Kampus Biru Universitas Muhammadiyah Makassar.

Billahi fii Sabilil Haq, Fastabiqul Khairat, Wassalamu'alaikum Wr.Wb

Makassar, Desember 2020

SUNARTI

ABSTRAK

SUNARTI, 2020 Analisis Pendapatan dan Belanja Desa di Desa Biji Nangka Kecamatan Sinjai Borong Program Studi Manajaemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar. Dibimbing oleh Pembimbing I oleh Bapak Akhmad dan Pembimbing II Bapak Firman Syah.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Pendapatan dan Belanja desa pemerintah Desa Biji Nangka Kecamatan Sinjai Borong Periode 2017-2019 yang bersumber dari dana desa. Jenis penelitian yang digunakan adalah deskriptif kuantitatif. Dimana teknik pengumpulan data yang digunakan adalah teknik obsevasi dan dokumentasi. Data yang diolah dalam penelitian ini adalah laporan realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) di Desa Biji Nangka Kecamatan Sinjai Borong.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa sumber pendapatan desa yang tertinggi didapat pada pendapatan transfer, dan sumber pendapatan desa yang di peroleh digunakan untuk belanja desa, terdapat belanja desa yang tertinggi yaitu pada bidang pelaksanaan pembangunan desa.

Kata Kunci: *Sumber Pendapatan Desa, Belanja Desa*

ABSTRACT

SUNARTI, 2020 Anlysis Village Income and Expenditure in Biji Nangka village Sinjai Borong district, Management Study Program Faculty of Economics and Business Muhammadiyah University Makassar, Supersived by supervisor I Mr. Akhmad and supervising II Mr. Firman Syah.

This study aims to determine the village government income and expenditure of Biji Nangka Village, Sinjai Borong District in the period of 2017-2019 by using analysis of the village independence ratio, effectiveness ratio, and efficiency ratio. This type of research is quantitative descriptive. Where data collection techniques used are observation techniques and documentation. The data processed in this research is the realization report of village Budget (APBDes) in biji nangka village, Sinjai Borong District. The data analysis technique used is the village independence ratio, effectiveness ratio and efficiency ratio.

The results of this study indicate that the financial performance of the government in Biji Nangka village, sinjai borong district in 2017 the village independence ratio is at a low level, the effectiveness ratio is at the effective level and the efficiency ratio is at a very efficient level. Whereas in 2018 the financial performance of the village government of Biji Nangka, sinjai borong district, the ratio of village independence is at a low level, the effectiveness ratio is at the ineffective level and the efficiency ratio is at the very efficient level. Then in 2019 the village independence ratio is at the effective level, and the efficiency ratio is at the very efficient level.

Keywords: Financial Performance, APBDes, Mandiri, Effectiveness, Efficient

DAFTAR ISI

SAMPUL	i
HALAMAN JUDUL.....	ii
HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN	iii
HALAMAN PERSETUJUAN.....	iv
HALAMAN PENGESAHAN.....	v
SURAT PERNYATAAN	vi
KATA PENGANTAR	vii
ABSTRAK.....	x
ABSTRACT.....	xi
DAFTAR ISI.....	xii
DAFTAR TABEL.....	xv
DAFTAR GAMBAR.....	xvi
DAFTAR LAMPIRAN.....	xvii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	5
C. Tujuan Penelitian.....	5
D. Manfaat Penelitian.....	5
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	7
A. Pengertian Desa.....	7
B. Pendapatan Desa.....	8
1. Pengertian Pendapatan Desa.....	8
2. Sumber-Sumber Pendapatan Desa.....	9
C. Belanja Desa.....	9

1. Pengertian Belanja Desa	9
2. Jenis-Jenis Belanja Desa	11
D. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa	12
1. Pengertian Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa	12
2. Fungsi Anggaran Desa	13
E. Tinjauan Empiris	14
F. Kerangka Pikir	18
G. Hipotesis	20
BAB III METODE PENELITIAN	21
A. Jenis Penelitian	21
B. Lokasi dan Waktu Penelitian	21
C. Definisi Operasional	22
D. Populasi dan Sampel	22
E. Teknik Pengumpulan Data	23
F. Teknik Analisis	24
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	27
A. Gambaran Umum Objek Penelitian	27
1. Sejarah Desa Biji Nangka	27
2. Visi dan Misi Desa Biji Nangka	29
3. Pengelolaan Keuangan Desa	31
4. Struktur Organisasi Pemerintah Desa Biji Nangka	34
B. Penyajian Data	37
C. Deskripsi Data	40
D. Analisis Data	50
E. Pembahasan	55

BAB V PENUTUP	57
A. Kesimpulan.....	57
B. Saran.....	58
DAFTAR PUSTAKA	59
DAFTAR LAMPIRAN	60



DAFTAR TABEL

Nomor	Judul	Halaman
Tabel 2.1	Penelitian Terdahulu	15
Tabel 3.1	Tingkat Kemandirian Keuangan Desa	25
Tabel 3.2	Kriteria Efektivitas Keuangan Desa	26
Tabel 4.1	Daftar Nama-Nama Kepala Desa Biji Nangka	29
Tabel 4.2	Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa	37
Tabel 4.3	Realisasi Pendapatan dan Realisasi Belanja	37
Tabel 4.4	Pendapatan Desa Tahun 2017-2019	39
Tabel 4.5	Perbandingan Anggaran Pendapatan	40
Tabel 4.6	Perbandingan Realisasi Pendapatan	42
Tabel 4.7	Persentase Anggaran Pendapatan dan Belanja	43
Tabel 4.8	Perbandingan Anggaran Belanja	53
Tabel 4.9	Perbandingan Realisasi Belanja Desa	48
Tabel 4.10	Persentase Anggaran dan Realisasi Belanja	50
Tabel 4.11	Perhitungan Rasio Kemandirian	52
Tabel 4.12	Perhitungan Rasio Efektivitas	53

DAFTAR GAMBAR

Nomor	Judul	Halaman
Gambar 2.1	Kerangka Pemikiran	19
Gambar 4.1	Siklus Pengelolaan Keuangan Desa	31
Gambar 4.2	Struktur Organisasi Kantor Desa Biji Nangka	34
Gambar 4.3	Jumlah Anggaran Pendapatan Desa	44
Gambar 4.4	Jumlah Realisasi Pendapatan Desa	45

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran	Halaman
1. Laporan Realisasi APBDes	61
2. Analisis Perhitungan APBDes	62
3. Wawancara	63
4. Dokumentasi Penelitian	64



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Desa merupakan bagian terbesar dari wilayah negara Indonesia yang terbesar di seluruh pelosok tanah air. Desa merupakan cikal bakal terbentuknya masyarakat politik. Desa sebagai institusi sosial sekarang telah memiliki posisi penting sebagai institusi pemerintah terendah dalam struktur pemerintah Indonesia. Peraturan perundang-undangan tentang Desa dalam Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa menyebutkan bahwa desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintah, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Posisi Desa memiliki peranan penting dalam menunjang kesuksesan bagi suatu pemerintahan nasional secara luas, bahkan desa juga dianggap sebagai posisi terdepan dalam menggapai suatu keberhasilan dari segala urusan dan program dari pemerintah. Desa sebagai unit organisasi pemerintah yang berhadapan langsung dengan masyarakat dengan segala latar belakang kepentingan dan kebutuhannya mempunyai peranan yang sangat penting, khususnya dalam pelaksanaan tugas dibidang pelayanan publik. Pasal 23 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 memberikan penegasan, yakni Pemerintahan Desa diselenggarakan oleh pemerintah desa.

Desa sebagai pemerintahan yang langsung bersentuhan dengan masyarakat menjadi fokus utama dalam pembangunan pemerintah, hal ini dikarenakan sebagian besar wilayah Indonesia adalah pedesaan. Terbentuknya suatu desa yang sejahtera pasti adanya sangkut paut dengan pemerintah daerah yang memiliki wewenang dalam mengatur dan mengelolah keuangan secara baik untuk suatu pembangunan yang didukung oleh kemandirian dalam perencanaan, penganggaran, dan pelaksanaan pembangunan. Sumber daya pembangunan yang didapat suatu desa harus dikelola oleh pemerintah setempat secara optimal demi untuk dimanfaatkan dalam pembangunan desa dan demi kesejahteraan sosial untuk seluruharganya.

Pemerintahan desa dalam rangka melaksanakan kewenangan yang dimiliki untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakatnya dihadapkan pada pengelolaan keuangan desa. Pemerintah desa mengelolah keuangan desa yang berupa pendapatan desa, pengeluaran dan pembiayaan. Pemerintah desa memuat hal-hal tersebut dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes). Yang telah disepakati bersama antara kepala desa dan Badan Permusyawaratan Daerah (BPD).

Dana desa dijadikan sebagai salah satu sumber keuangan desa dan pembiayaan pembanguna desa sesuai dengan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

Salah satu aspek yang ikut berperan penting dalam pengembangan desa adalah keuangan desa dan aset desa. Keuangan desa yaitu yang berkaitan tentang hak dan kewajiban desa yang dapat dinilai dengan uang, sedangkan

aset desa adalah barang milik desa yang bersumber dari dari kekayaan asli desa, yang dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa atau bersumber dari perolehan hak lainnya yang sah.

Selama ini penyusunan APBDes masih dilakukan berdasarkan pertimbangan anggaran tradisional (*incremental budget*) sehingga seringkali mengabaikan kinerja keuangan dalam APBDes. Anggaran pendapatan seringkali dibuat lebih kecil dari potensi pendapatan yang mungkin didapat agar lebih besar jumlahnya dari anggaran pendapatan yang telah dibuat, sedangkan belanja desa memiliki sifat yang relatif mudah dilakukan dan rentan akan terjadinya pemborosan dan kebocoran sehingga memungkinkan anggaran belanja dibuat lebih besar dari potensi realisasi belanja yang sebenarnya.

Penggunaan analisis rasio sebagai alat analisis keuangan secara luas sudah diterapkan pada lembaga perusahaan yang bersifat komersial, sedangkan pada lembaga publik khususnya pemerintah desa masih terbatas. Hal ini dikarenakan:

1. Keterbatasan penyajian laporan keuangan pada lembaga pemerintahan desa yang sifatnya dan cakupannya berbeda dengan penyajian laporan keuangan oleh lembaga perusahaan yang bersifat komersial.
2. Penyusunan APBes sebagian masih dilakukan berdasarkan pertimbangan anggaran tradisional (*incremental budget*) yaitu besarnya masing-masing komponen pendapatan dan pengeluaran dihitung meningkatkan sejumlah persentase tertentu. Oleh sebab itu sering kali mengabaikan rasio keuangan dalam APBes.

3. Penilaian keberhasilan APBDes sebagai penelitian pertanggungjawaban pengelolaan keuangan desa lebih ditekankan pada pencapaian target, sehingga kurang memperhatikan bagaimana perubahan yang terjadi pada komposisi ataupun struktur APBDesnya.

Dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dan pemberdayaan masyarakat pemerintah pusat dan pemerintah daerah memberikan dana berupa Aokasi Dana Desa (ADD). ADD merupakan salah satu komponen dari Anggaran Pendapatan Desa dan Belanja Desa (APBdesa). Dalam pelaksanaan APDesa Pemerintah Desa Biji Nangka memprioritaskan pembangunan dalam bidang pekerjaan umum yang terkait dengan sarana dan prasarana desa dan selain itu dana APBdesa juga digunakan untuk pengembangan potensi lainnya.

Fenomena masalah dalam penelitian ini yaitu jika ada kenaikan pada pendapatan desa maka akan ada kenaikan juga pada belanja desanya begitupun sebaliknya jika ada penurunan pada pendapatan desa maka belanja desa akan mengalami penurunan. Oleh sebab itu, perlu diadakan pembuktian untuk mengetahui apakah pendapatan desa mampu memenuhi belanja desa pada Desa Biji Nangka.

Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas, maka penulis tertarik untuk membuat suatu penelitian skripsi yang berjudul "***Analisis Pendapatan Dan Belanja Desa di Kantor Desa Biji Nangka Kecamatan Sinjai Borong***".

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan diatas, maka rumusan masalah sebagai berikut:

Bagaimana sumber pendapatan dan belanja desa pada Kantor Desa Biji Nangka Kecamatan Sinjai Borong?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah yang diuraikan diatas, maka tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah:

Menganalisis tentang sumber pendapatan dan belanja desa pada Kantor Desa Biji Nangka Kecamatan Sinjai Borong.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang diharapkan penulis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagi Peneliti

Selain sebagai syarat menyelesaikan pendidikan, juga dapat menambah pengetahuan bidang ilmu manajemen keuangan, dan melatih penulis untuk dapat menerapkan teori-teori yang diperoleh dari bangku kuliah.

2. Bagi Akademisi

Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan perbandingan dan referensi untuk penelitian selanjutnya.

3. Bagi Pemerintah

Hasil penelitian ini diharapkan sebagai bahan masukan dalam pengambilan keputusan, terutama dalam penentuan arah yang strategis

untuk menilai kinerja keuangan pemerintah desa dalam anggaran pendapatan dan belanja desa dimasa yang akan datang.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengertian Desa

Desa adalah bentuk pemerintahan terkecil yang ada di Negeri ini. Luas wilayah desa biasanya tidak terlalu luas dan dihuni oleh sejumlah keluarga. Mayoritas penduduknya bekerja dibidang agraris dan tingkat pendidikannya cenderung rendah karena jumlah penduduknya tidak begitu banyak, hubungan kekerabatan antar masyarakatnya biasanya terjalin kuat. Para masyarakatnya juga masih percaya dan memegang teguh adat dan tradisi yang ditingalkan pada leluhur mereka.

Pengertian desa menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa menyatakan bahwa desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan / hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Menurut Hanif Nurcholis (2011:3), desa adalah satuan pemerintahan terendah. Salah satu bentuk urusan pemerintaha desa yang menjadi kewenangan desa adalah pengelolaan keuangan desa. Keuangan desa adalah semua hak dan kewajiban desa yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik desa berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban.

Kamus Besar Bahasa Indonesia (2007) desa adalah kesatuan wilayah yang dihuni oleh sejumlah keluarga yang mempunyai sistem pemerintahan sendiri (dikepalai oleh seorang kepala desa) atau desa merupakan kelompok rumah diluar kota yang merupakan kesatuan.

B. Pendapatan Desa

1. Pengertian Pendapatan Desa

Pendapatan desa adalah segala jenis pendapatan yang berasal dari sumber-sumber yang dimiliki desa atau sumber-sumber yang berada di bawah pengelolaan desa. Pendapatan Desa adalah semua hak desa yang diakui sebagai penambahan nilai bersih keuangan Desa yang diperoleh dalam setiap tahun anggaran. Kekayaan desa adalah semua hak desa yang diakui sebagai salah satu sumber pendapatan desa yang dikelola oleh pemerintah desa.

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) pada pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan Nomor 2 Tentang Laporan Realisasi Anggaran dinyatakan bahwa pendapan adalah semua penerimaan Rekening Kas Umum Negara / Daerah yang menambah ekuitas dada lancar dalam periode tahun anggaran yang betrsangkutan yang menjadi hak pemerintah, dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah.

Menurut peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 113 Tahun 2014, pendapatan desa adalah semua penerimaan uang melalui rekening desa yang merupakan hak desa dalam 1 (Satu) Tahun Anggaran yang tidak perlu dibayar kembali oleh desa.

Pendapatan desa adalah semua penerimaan kas desa yang menambah ekuitas pada periode tahun anggaran yang bersangkutan dan hak menjadi pemerintah desa yang tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah desa.

2. Sumber-Sumber pendapatan Desa

Menurut Undang-Undang Desa Pasal 72 ayat (1), sumber pendapatan desa terdiri atas :

- a. Pendapatan asli Desa terdiri atas hasil usaha, hasil aset, swadaya dan partisipasi, gotong royong, dan lain-lain pendapatan asli Desa
- b. Alokasi anggaran pendapatan dan belanja negara
- c. Bagian dari hasil pajak daerah dan retribusi daerah kabupaten / kota
- d. Alokasi dana desa yang merupakan bagian dari dana perimbangan yang diterima Kabupaten / Kota
- e. Bantuan keuangan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten / Kota
- f. Hibah dan sumbangan yang tidak mengikat dari pihak ketiga
- g. Lain-lain pendapatan desa yang sah.

C. Belanja Desa

1. Pengertian Belanja Desa

Belanja dilingkungan akuntansi pemerintah di Indonesia diartikan sebagai semua pengeluaran bendahara umum negara / daerah yang mengurangi ekuitas dana lancar dalam periode tahun anggaran yang

bersangkutan yang tidak akan diperoleh kembali pembayarannya oleh pemerintah.

Menurut Siregar (2015: 31), Belanja desa adalah semua pengeluaran dari rekening kas umum desa yang mengurangi saldo anggaran lebih dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah desa.

Belanja desa berdasarkan peraturan Menteri dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 113 Tahun 2014. Tentang pengelolaan keuangan desa adalah semua pengeluaran dari rekening desa yang merupakan kewajiban desa dalam 1 (satu) Tahun Anggaran yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh desa. Besarnya alokasi belanja desa harus disesuaikan dengan pendapatan desa yang diperoleh. Makin besar pendapatan desa maka akan semakin besar pula belanja desa yang bisa digunakan untuk pembangunan desa. Dengan meningkatnya belanja desa pada tiap tahunnya mengakibatkan pembangunan sarana prasarana desa dan Dusun pada tahun-tahun yang akan datang juga meningkat secara signifikan Hoesada (2014).

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 Tentang Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) pada pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan Nomor 3 Tentang Laporan Arus Kas dinyatakan bahwa belanja adalah semua pengeluaran dari Rekening kas umum Negara / Daerah yang mengurangi ekuitas dana lancar dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah.

2. Jenis-Jenis belanja Desa

Menurut Anwar Mishabul (2011) jenis-jenis belanja Desa terdiri atas:

a. Belanja Pegawai adalah pengeluaran penghasilan tetap dan tunjangan bagi Kepala Desa dan perangkat Desa serta tunjangan BPD. Dianggarkan dalam kelompok penyelenggaraan pemerintahan Desa. Kegiatan pembayaran penghasilan tetap dan tunjangan yang dibayarkan setiap bulan.

b. Belanja Barang dan Jasa adalah pengeluaran pembelian / pengadaan barang yang dinilai manfaatnya kurang dari 12 (dua belas) bulan.

Belanja barang / jasa antara lain:

- 1) Alat tulis kantor
- 2) Benda pos
- 3) Bahan/ material
- 4) Pemeliharaan
- 5) Cetak / penggandaan
- 6) Sewa kantor desa
- 7) Sewa perlengkapan dan peralatan kantor
- 8) Makanan dan minuman rapat
- 9) Pakaian dinas dan atributnya
- 10) Perjalanan dinas
- 11) Upah kerja
- 12) Honorarium narasumber / ahli
- 13) Operasional pemerintah desa
- 14) Operasional BPD
- 15) Insentif rukun tetangga / rukun warga

- c. Belanja modal adalah pengeluaran dalam rangka pembelian / pengadaan barang atau bangunan yang nilai manfaatnya lebih dari 12 (dua belas) bulan. Pembelian / pengadaan barang atau bangunan untuk kegiatan penyelenggaraan kewenangan desa.

D. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa

1. Pengertian Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa

Anggaran pendapatan dan belanja desa (APBDesa) merupakan suatu proses rencana keuangan tahunan pemerintah desa yang telah dibahas atau disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan badan permusyawaratan daerah yang ditetapkan dengan peraturan desa yang meliputi pendapatan, belanja, dan pembiayaan. Adanya anggaran pendapatan dan belanja desa (APBDesa) pelaksanaan pemerintahan desa akan memiliki rencana yang strategis dan terukur berdasarkan anggaran yang sudah ada dan yang akan digunakan.

Menurut Peraturan Pemerintahan Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, dinyatakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disebut APBDesa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.

Anggaran pendapatan dan belanja desa adalah pertanggungjawaban dan pemegang manajemen desa untuk memberikan informasi tentang semua aktifitas dan kegiatan desa kepada masyarakat dan pemerintah desa atas pengelolaan dana keuangan desa dan pelaksanaan berupa rencana-rencana program yang dibiayai dengan uang desa.

2. Fungsi Anggaran Desa

Anggaran desa mempunyai fungsi utama yaitu sebagai berikut:

a. Alat Perencanaan

Anggaran merupakan alat pengendali manajemen desa dalam rangka mencapai tujuan. Anggaran desa digunakan untuk merencanakan kegiatan apa saja yang dilakukan oleh desa beserta rincian biaya yang dibutuhkan dan rencana sumber pendapatan yang akan diperoleh desa.

b. Alat Pengendalian

Anggaran berisi perencanaan detail atas pendapatan dan pengeluaran desa, dimaksudkan dengan adanya anggaran, semua bentuk pengeluaran dan pemasukan dapat dipertanggungjawabkan kepada publik. Tanpa adanya anggaran, desa akan sulit mengendalikan pengeluaran dan pemasukan.

c. Alat kebijakan fiskal

Dengan menggunakan anggaran dapat diketahui bagaimana kebijaksanaan fiskal yang akan dijelaskan desa, dengan demikian akan mudah memprediksi dan mengestimasi ekonomi dan organisasi.

d. Alat koordinasi dan komunikasi

Dalam menyusun anggaran, pasti antar unit kerja akan melakukan komunikasi dan koordinasi. Dalam perencanaan dan pelaksanaan anggaran harus dikomunikasikan ke seluruh perangkat desa.

e. Alat penilaian kerja

Perencanaan anggaran dan pelaksanaannya akan menjadi penilaian kinerja perangkat desa. Kinerja perangkat desa akan dinilai berdasarkan pencapaian target anggaran serta pelaksanaan efisiensi anggaran.

f. Alat motivasi

Anggaran dapat digunakan untuk memberi motivasi kepada perangkat desa dalam bekerja secara efektif dan efisien.

E. Tinjauan Empiris

Empiris merupakan suatu keadaan yang berdasarkan pada peristiwa atau kejadian nyata yang pernah dialami serta didapat dengan melalui penelitian, pengamatan ataupun juga eksperimen yang pernah dilakukan. Kejadian tersebut bisa didapatkan melalui penelitian, observasi ataupun eksperimen. Di dalam empiris, pengalaman (kejadian nyata) menjadi dasar yang sangat mutlak dan peran akal sangatlah sehat. Bila ada pernyataan, data itu empiris, berarti data tersebut didasarkan pada penelitian ataupun eksperimen yang telah dilakukan.

Menurut Sugiyono (2013), empiris merupakan suatu metode pengamatan yang dilakukan oleh indera manusia, sehingga metode yang digunakan juga dapat atau bisa diketahui serta juga diamati oleh orang lain.

Tabel 2.1
Penelitian Terdahulu

NO	Peneliti	Judul	Metode	Hasil
1	M. Rinaldi Aulia (2016)	Analisis Pengelolaan Dana Desa Pada Pemerintahan Desa (Studi kasus pada Kecamatan V Koto Kampung Dalam Kabupaten Padang Pariaman Tahun Anggaran 2015)	Metode analisis data kualitatif	Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengelolaan dana desa yang dilakukan oleh dua Nagari yaitu Nagari Sikucur dan Nagari Campago cukup baik, yaitu mulai dari perencanaan sampai dengan pertanggungjawabannya.
2	Irma (2015)	Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) Di Kecamatan Dolo Selatan Kabupaten Sigi	Metode Penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif	Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengelolaan ADD di Kecamatan Dolo Selatan Kabupaten Sigi dengan tahapan perencanaan, pelaksanaan dan pertanggungjawaban dengan dasar pedoman

				pelaksanaan Peraturan Bupati Sigi Nomor 4 Tahun 2012 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa.
3	Widiyanti (2016)	Akuntabilitas dan Metode Transparansi Penelitian Pengelolaan Alokasi Dana Desa (Studi Kasus pada Desa Sumberejo dan Desa Kandung di Kecamatan Winongan Kabupaten Pasuruhan)	Metode penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif	Hasil penelitiannya yaitu penelitian berdasarkan permendagri No. 113 Tahun 2014 menunjukkan bahwa secara garis besar pengelolaan alokasi dana desa di Desa Sumberejo di Kecamatan Winongan Kabupaten Pasuruhan sudah akuntabel dan transparan pada tahapan penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawabannya. Didukung pula dengan masyarakat

				<p>yang turut aktif dalam melakukan pembangunan desa. Sedangkan untuk desa Kndung menunjukkan hasil yang tidak akuntabel dan transparan. Bukan hanya tidak transparan terhadap masyarakat namun juga untuk pihak internalnya sendiri.</p>
4	Putri Octavian tri (2017)	Peranan Kepala Desa mengelola sumber-sumber Pendapatan Desa Di Desa Laboi Jaya Kecamatan Bangkinang Kabupaten Kampar	Metode Dalam kualitatif yang bersifat deskriptif	<p>Berdasarkan hasil penelitian bahwa peranan kepala desa dalam mengelola sumber pendapatan desa di adaesa Laboi Jaya telah berjalan dengan baik dari keseluruhan kegiatan yang menjadi indikator dalam penelitian ini dan telah sesuai dengan peraturan yang telah</p>

				ditetapkan.
5	Ratna Sari Dewi & Ova Novi Irama (2018)	Pengaruh Pendapatan Desa dan Alokasi Dana Desa Terhadap Belanja Desa dan Kemiskinan di Kantor Badan Pusat Statistik Sumatera Utara	Metode penelitian deskriptif kuantitatif dan bersifat asosiatif	Hasil penelitian menunjukkan bahwa pendapatan desa dan alokasi dan desa memiliki pengaruh langsung terhadap anggaran belanja desa dan kemiskinan

F. Kerangka Konsep

Kerangka pikir merupakan sebuah model atau juga gambaran yang berupa konsep yang didalamnya itu menjelaskan mengenai suatu hubungan antara variabel yang satu dengan variabel lainnya yang akan diteliti berdasarkan teori yang menjadi sebagai bahan rujukan penelitian. Dalam kerangka pikir ini, akan dijelaskan mengenai keberadaan variabel yang akan dijadikan sebagai dimensi penelitian yaitu pendapatan desa dan belanja desa.

Adapun secara skematis alur kerangka penelitian terdapat dalam gambar kerangka penelitian adalah sebagai berikut:



Gambar 2.1

KERANGKA PEMIKIRAN

G. Hipotesis

Hipotesis adalah dugaan atau jawaban sementara terhadap suatu masalah yang sifatnya praduga dan harus dibuktikan kebenarannya melalui suatu penelitian.

Menurut Sugiyono (2009:118), Hipotesis adalah jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian, dimana rumusan masalah penelitian telah dinyatakan dalam bentuk kalimat pernyataan.

Berdasarkan pertanyaan penelitian, maka hipotesis sebagai berikut :
"Diduga bahwa sumber pendapatan berpengaruh penting terhadap belanja desa pada Desa Biji Nangka, Kecamatan Sinjai Borong."



BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan oleh penulis ini adalah penelitian deskriptif kuantitatif, dimana penelitian deskriptif merupakan jenis penelitian yang dilakukan dengan cara mengumpulkan dan menyiapkan data serta menganalisis data, hingga mendapatkan gambaran yang sesuai dengan masalah yang diteliti. Sedangkan penelitian kuantitatif merupakan data yang didapatkan atau yang diperoleh dari laporan-laporan yang berhubungan dengan penelitian.

B. Lokasi Dan Waktu Penelitian

1. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan pada Kantor Desa Biji Nangka dengan mengambil data dari bagian pengelolaan keuangan di Jalan Persatuan Raya Biji Nangka, Desa Biji Nangka, Kecamatan Sinjai Borong, Kabupaten Sinjai, Provinsi Sulawesi Selatan, Kode Pos 92662.

2. Waktu Penelitian

Waktu yang digunakan dalam penelitian ini kurang lebih 2 (dua) bulan mulai dari bulan september sampai bulan oktober

C. Definisi Operasional

Pendapatan desa merupakan segala jenis pendapatan yang berasal dari sumber-sumber yang dimiliki desa atau sumber-sumber yang berada dibawah pengelolaan desa. Pendapatan desa adalah semua hak desa yang diakui sebagai penambahan nilai bersih keuangan desa yang diperoleh dalam setiap tahun anggaran.

Penerimaan Desa sebagaimana meliputi semua penerimaan uang melalui rekening desa yang merupakan hak desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak perlu dibayar kembali oleh desa. Perkiraan pendapatan desa disusun berdasarkan asumsi realisasi pendapatan desa tahun sebelumnya dengan perkiraan peningkatan berdasarkan potensi yang menjadi sumber Pendapatan Asli Desa, Bagian Dana Perimbangan, Bantuan Keuangan dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten, Hibah, Sumbangan Pihak Ketiga dan Dana Desa yang bersumber dari APBN.

Belanja di lingkungan akuntansi pemerintah di Indonesia diartikan sebagai semua pengeluaran bendahara umum Negara / Daerah yang mengurangi ekuitas dana lancar dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang tidak akan diperoleh kembali pembayarannya oleh pemerintah.

D. Populasi Dan Sampel

1. Populasi

Menurut Sugiyono (2014:119) populasi adalah wilayah generalisasi yang terjadi atas objek / subjek yang mempunyai kualitas

dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. Populasi dalam penelitian ini yaitu Laporan Realisasi APBDes Desa Biji Nangka, Kecamatan Sinjai Borong, Kabupaten Sinjai.

2. Sampel

Menurut Sugiyono (2014:120) sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi. Sampel dalam penelitian ini yaitu Laporan Realisasi APBDes Desa Biji Nangka, Kecamatan Sinjai Borong, Kabupaten Sinjai selama 3 Tahun yaitu dari Tahun 2017 sampai dengan Tahun 2019.

E. Teknik Pengumpulan Data

Teknik yang digunakan untuk mengumpulkan data dalam pelaksanaan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Observasi merupakan teknik pengumpulan data, dimana peneliti melakukan pengamatan secara langsung objek penelitian untuk melihat data dekat kegiatan yang dilakukan
2. Wawancara adalah pengumpulan data dengan cara menggunakan pertanyaan lisan kepada subyek penelitian. Hal ini dilakukan untuk mendapatkan gambaran dari permasalahan yang biasanya terjadi karena sebab-sebab khusus yang tidak dapat disajikan
3. Dokumentasi yaitu metode yang dilakukan untuk mencari atau mengumpulkan data sekunder agar mendapatkan data yang mendukung dalam penelitian ini, misal catatan atau laporan keuangan, laporan realisasi, dan sebagainya.

F. Teknik Analisis

Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini yaitu metode deskriptif kuantitatif, dimana metode ini berfungsi untuk mengumpulkan, menginterpretasikan, dan mengolah data yang diperoleh serta memberikan penjelasan yang lengkap. Berikut analisis yang digunakan dalam penelitian ini:

1. Rasio Kemandirian Keuangan Desa

Rasio kemandirian keuangan desa merupakan kemampuan desa dalam membiayai sendiri kegiatan pemerintah, pembangunan, dan pemberdayaan masyarakat. Kemandirian keuangan desa dilihat pada besar kecilnya pendapatan asli desa dibandingkan dengan pendapatan desa yang berasal dari sumber lainnya seperti dana bagi hasil, bagian dana perimbangan pusat dan daerah, bantuan keuangan pemerintah/provinsi/kabupaten/desa, hibah, serta sumbangan dari pihak ketiga. Rasio kemandirian desa ditunjukkan dari besar kecilnya rasio kemandirian serta rasio ketergantungan desa terhadap sumber dana eksternal (dari pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten/kota). Semakin tinggi rasio keuangan desa, maka tingkat ketergantungan terhadap pihak eksternal (terutama pemerintah pusat, provinsi, kabupaten, dan desa) semakin rendah dan sebaliknya (Sumarna, 2017).

Rasio ini juga menggambarkan tingkat partisipasi suatu masyarakat dalam pembangunan desa. Dengan semakin tingginya rasio ini maka semakin tinggi pula partisipasi masyarakat dalam berswadaya dan berpartisipasi yang merupakan komponen utama

Pendapatan Asli Desa. Semakin tinggi tingkat masyarakat yang berbudaya serta berpartisipasi ini menggambarkan bahwa tingkat kesejahteraan masyarakat yang baik (Sumarna, 2017).

Berikut rumus untuk menghitung rasio kemandirian desa:

$$\text{Rasio Kemandirian Desa} = \frac{\text{Pendapatan Asli Desa}}{\text{Pendapatan diluar pendapatan asli desa}}$$

Untuk menilai tinggi rendahnya rasio kemandirian pemerintah Desa Biji Nangka dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

Tabel 3.1
Tingkat Kemandirian atau Kemampuan Keuangan Desa

Kemampuan Keuangan	Kemandirian (%)
Rendah Sekali	0-25%
Rendah	25%-50%
Sedang	50%-75%
Tinggi	75%-100%

Sumber: Sumarna, 2017

2. Rasio Efektivitas

Rasio ini menggambarkan kemampuan pemerintah desa dalam merealisasikan pendapatan asli desa yang direncanakan dibandingkan dengan target yang ditetapkan berdasarkan potensi riil desa. Pemerintah desa dikatakan mampu menjalankan tugasnya

apabila rasio yang dicapai minimal 1 sampai 100% akan tetapi semakin tinggi rasio ini maka itu menunjukkan bahwa kemampuan desa semakin baik. (Sumarna, 2017).

Berikut rumus untuk menghitung rasio efektivitas:

$$\text{Rasio efektivitas} = \frac{\text{realisasi Penerimaan PADes}}{\text{Anggaran penerimaan PADes}}$$

Untuk menilai tingkat efektivitas keuangan pemerintah Desa Biji Nangka dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.2
Kriteria Efektivitas Keuangan Desa

Kriteria Efektivitas	Persentase Efektivitas(%)
Sangat efektif	>100%
Efektif	>90%-100%
Cukup efektif	>80%-90%
Kurang efektif	>60%-80%
Tidak efektif	60%

Sumber: Sumarna, 2017

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Objek Penelitian

1. Sejarah Desa Biji Nangka

Sejak beberapa tahun yang lalu Sinjai Borong masih perwakilan kecamatan Sinjai Barat pada waktu itu nama desa sudah ada yakni Desa Biji Nangka dan yang memberi nama Desa Biji Nangka adalah A. Muh. Saleh yang terdiri dari 3 dusun yaitu : Nangkae, Tomantang, dan Polewali. Yang di bawah kepemimpinan Kepala Desa Andi Taherong sejak tahun 1962 sampai 1974 kemudian seiring perkembangan tingkat kependudukan yang cukup pesat maka dengan inisiatif pemerintah setempat bersama tokoh masyarakat pada tahun 1989 mengadakan musyawarah untuk pemekaran dusun pada waktu itu di sepakati dari 3 Dusun (Nangkae, Tomantang dan Polewali) di ubah menjadi dusun yaitu Dusun Nangkae, Dusun Bungae dan Dusun Samaenre yang pada waktu itu yang di motori oleh Kepala Desa Muh. Djafar Sudja dan pada tahun 2001 Desa Biji Nangka mengadakan pemilihan Kepala Desa dan yang memperoleh suara terbanyak adalah Bahar S.ag.

Sebagian besar wilayah desa (sekitar 65%) merupakan pertanian dan perkebunan padi, cengkeh, kopi, coklat dan manggis. Tanaman ini diperkenalkan oleh orang-orang pedagang dari bangsa Belanda, pembukaan perkebunan telah mengurangi area hutan dan rawa yang

semula mendominasi wilayah desa. Pada zaman orde baru sudah berkurang, ketika harga hasil perkebunan di pasar eropa naik cukup tajam, area perkebunan meningkat lagi tentu saja berpengaruh terhadap luas area hutan dan rawa.

Pembukaan lahan untuk tanaman pangan, yaitu ubi kayu, jagung serta padi semakin mengurangi luas hutan dan rawa, juga berpengaruh terhadap persediaan air tanah di desa. Air sungai yang semula jernih berubah warna menjadi kecoklatan, ketika semakin banyak warga yang menebang hutan untuk lahan pertanian air tanah dan sumur pun kini juga semakin dalam.

★ Desa Biji Nangka merupakan salah satu desa di Kecamatan Sinjai Borong Kabupaten Sinjai, Provinsi Sulawesi Selatan, yang memiliki luas wilayah 66.97 km². Secara geografis Desa Biji Nangka berbatasan wilayah sebagai berikut:

Sebelah Utara : Berbatasan dengan Desa Batu Belerang
 Sebelah Timur : Berbatasan dengan Desa Bonto Sinala
 Sebelah Selatan : Berbatasan dengan Desa Palangka (Sinjai Selatan)

Sebelah Barat : Berbatasan dengan Desa Barambang

Secara administratif, wilayah Desa Biji Nangka terdiri dari Kepala Dusun, Rukun Warga (RW), dan Rukun Tetangga (RT).

Secara umum Tripologi sebagian besar masyarakat Desa Biji Nangka mempunyai mata pencaharian di bidang pertanian. Menurut catatan monografi Desa pada tahun 2017 jumlah kepala keluarga yang bekerja di bidang pertanian sebanyak 525 orang sedangkan

sebagian lainnya bekerja dibidang perdagangan, peternakan, pengusaha, buruh (persawahan, perladangan, perkebunan, peternakan, kerajinan dan industri kecil, industri sedang dan besar, jasa dan perdagangan).

Adapun daftar Nama-nama kepala desa yang pernah menjabat di Desa Biji Nangka Kecamatan Sinjai Borong, yaitu:

Tabel 4.1
Daftar Nama-Nama Kepala Desa Biji Nangka

NO	NAMA KEPALA DESA	PERIODE	KETERANGAN
1	A. Taherong	1962-1974	Definitif
2	A. Aziz Taherong	1974-1983	Definitif
3	Muh. Djafar Sudja	1984-2001	Definitif
4	Bahar, S.ag	2001-2013	Definitif
5	Abd. Rauf	2014-sekarang	Definitif

Sumber: Data Desa Biji Nangka

2. Visi dan Misi Desa Biji Nangka

Sesuai dengan kaidah perundang-undangan bahwa Rencana Kerja Pemerintah desa harus selaras Rencana Pembangunan Jangka Menengah desa, maka Rencana Kerja Pemerintah Desa Biji Nangka Tahun 2019 disusun dengan memperhatikan Visi dan Misi Desa Biji Nangka yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa.

a. Visi Desa Biji Nangka

Terwujudnya masyarakat Desa Biji Nangka yang lebih aman, tenteram, berkeadilan dan sejahtera terpadu dalam pelayanan prima, cepat, tepat dan efisien.

b. Misi Desa Biji Nangka

Selain penyusunan visi juga telah ditetapkan misi-misi yang memuat sesuatu pernyataan yang harus dilaksanakan oleh Desa agar tercapai visi desa tersebut:

- 1) Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang mendukung perekonomian Desa
- 2) Meningkatkan pembangunan di bidang kesehatan untuk mendorong derajat kesejahteraan masyarakat
- 3) Meningkatkan pembangunan di bidang pendidikan dan budaya untuk mendorong peningkatan kualitas sumber daya manusia
- 4) Meningkatkan pembangunan di bidang keagamaan, iman dan taqwa kepada Allah SWT
- 5) Meningkatkan pembangunan di bidang perekonomian dengan mendorong semakin tumbuh dan berkembangnya pembangunan di bidang pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan, industri dan perdagangan
- 6) Menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik berdasarkan demokrasi, transparan, akuntabilitas, penegakan aturan berkeadilan, kesetaraan gender dan mengutamakan pelayanan prima kepada masyarakat

- 7) Meningkatkan dan memelihara keamanan dan ketentraman masyarakat dalam semangat gotong royong dalam membangun desa.

3. Pengelolaan Keuangan Desa

Keuangan desa dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 113 Tahun 2014 tentang desa dan pengelolaan keuangan desa, dimana desa merupakan semua hak dan kewajiban desa yang dapat di nilai dengan uang, serta segala sesuatunya berupa uang dan barang yang berkaitan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban desa. Peraturan ini bertujuan untuk mempermudah pengelolaan keuangan desa sehingga tidak ada kesalahan dalam penerapannya. Dengan itu diharapkan dapat mewujudkan pengelolaan keuangan yang efisien dan efektif.

Pengelolaan keuangan desa di desa menjadi aspek yang sangat penting dan sangat mendasar serta harus dimiliki oleh para pemangku kepentingan dipemerintahan desa khususnya perangkat desa didalam mewujudkan transparansi dan akuntabilitas. Berikut siklus pengelolaan keuangan desa :



Gambar 4.1

Siklus Pengelolaan Keuangan Desa

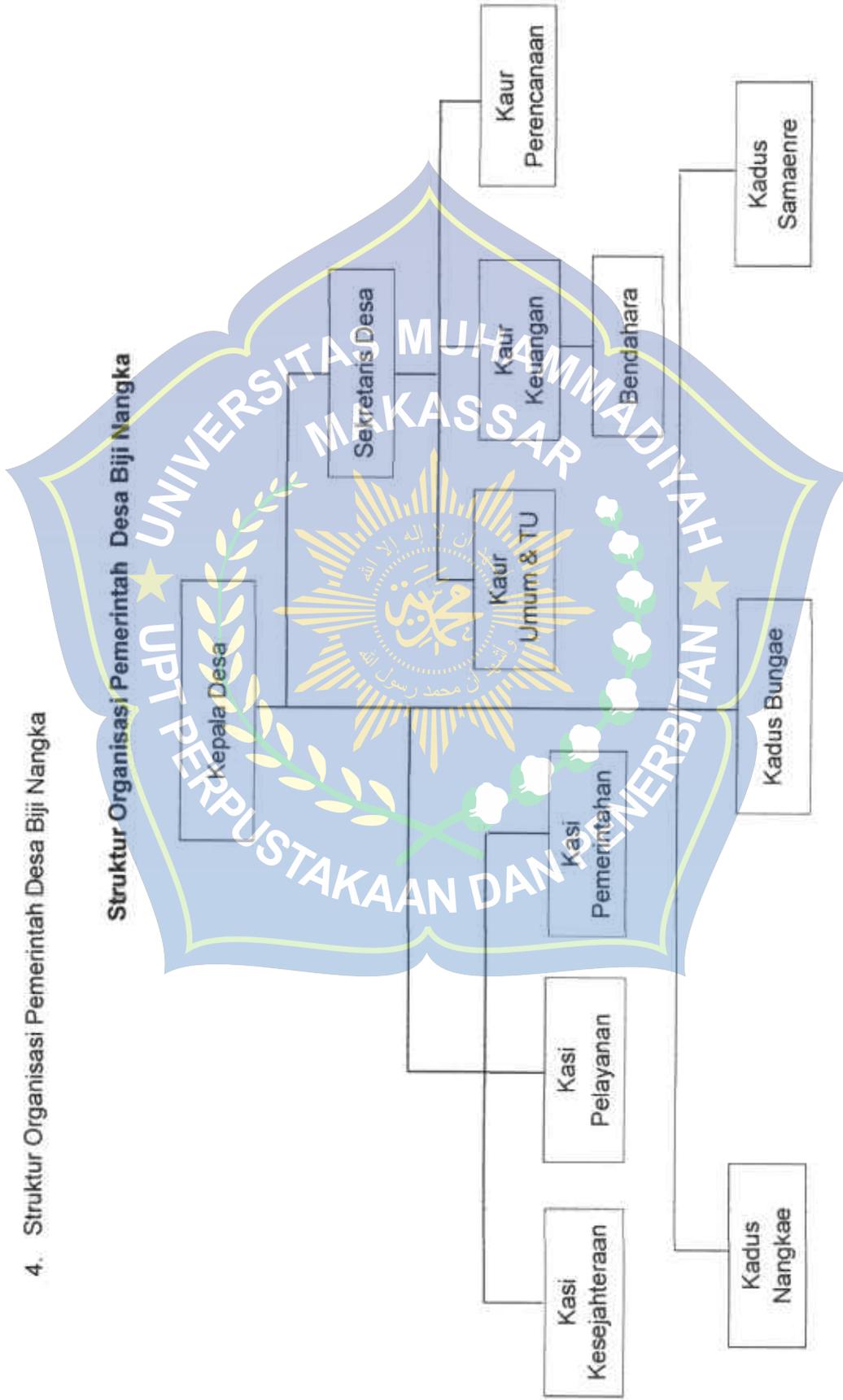
Keuangan desa dikelola sesuai dengan peraturan-peraturan pemerintahan yang baik serta asas-asas pengelolaan keuangan yang tertuang dalam Pemdagri Nomor 113 tahun 2014 yang terdiri dari: transparan, akuntabel, partisipatif, dan disiplin anggaran. Pelaksanaan Teknis Pengelolaan Keuangan Desa yaitu unsur desa yang bertugas membantu kepala desa dalam pengurusan pengelolaan keuangan desa serta Pelaksanaan Teknis Pengelolaan Keuangan Desa ditetapkan dengan keputusan kepala desa. Pelaksanaan Pengelolaan Keuangan Desa terdiri dari Sekretaris Desa, Kepala Seksi, dan Bendahara. Aparatur desa yang tercantum dalam Pelaksanaan Teknis Pengelolaan Keuangan Desa ini memiliki tugas sebagai berikut:

- a. Tugas sekretaris desa dalam pengelolaan keuangan yaitu: menyusun dan melaksanakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, menyusun perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, dan pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, mengendalikan pelaksanaan kegiatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, menyusun pelaporan dan pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, serta memferifikasi bukti-bukti penerimaan dan pengeluaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.
- b. Tugas kepala seksi dalam pengelolaan keuangan yaitu: menyusun rencana kegiatan, melaksanakan kegiatan bersama lembaga kemasyarakatan desa, melakukan tindakan pengeluaran yang membebani anggaran belanja, mengendalikan dan melaporkan pelaksanaan kegiatan kepala desa.

- c. Tugas bendahara dalam pengelolaan keuangan yaitu: menerima, menyimpan, menyetorkan, membayar, menatausahakan, serta mempertanggungjawabkan penerimaan dan pengeluaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.



4. Struktur Organisasi Pemerintah Desa Biji Nangka



Gambar 4.2 Bagan Struktur Organisasi

Uraian tugas jabatan struktural pada Kantor Desa Biji Nangka kabupaten sinjai:

a. Kepala Desa

Kepala desa mempunyai tugas pokok menyelenggarakan urusan pemerintah, pembangunan, dan kemasyarakatan.

b. Sekretaris Desa

Sekretaris mempunyai tugas pokok yaitu memberikan pelayanan teknis administratif dan fungsional kepada semua satuan organisasi dalam lingkup kantor desa dan bertanggung jawab langsung kepada kepala desa.

c. Kepala Seksi Pemerintahan

Kepala seksi pemerintahan mempunyai tugas pokok yaitu melakukan penyusunan rencana dan penyelenggaraan pembinaan ideologi negara dan kesatuan bangsa, pembinaan ketentraman dan ketertiban kemasyarakatan.

d. Kepala Seksi Kesejahteraan

Kepala seksi kesejahteraan mempunyai tugas yaitu melakukan penyusunan rencana dan penyelenggaraan pembinaan kemasyarakatan, fasilitas kegiatan organisasi sosial kemasyarakatan, penanggulangan, bencana alam, serta fasilitas penyelenggaraan pendidikan, kesehatan, generasi muda, keolahragaan dan peranan wanita.

e. Kepala Seksi Pelayanan

Kepala seksi pelayanan mempunyai tugas membantu kepala desa dalam pelaksanaan tugas operasional.

f. Kepala Urusan Umum dan Tata Usaha

Kepala urusan umum dan tata usaha mempunyai tugas menyusun rencana kerja, melaksanakan tugas teknis ketatausahaan, mengelola dan administrasi kepegawaian.

g. Kepala Urusan Keuangan

Kepala urusan keuangan mempunyai tugas melakukan pengelolaan administrasi keuangan meliputi penyusunan anggaran, penggunaan anggaran, pembukuan, dan pertanggungjawaban.

h. Kepala Urusan Perencanaan

Kepala urusan perencanaan mempunyai tugas mempersiapkan bahan penyusunan dan pengendalian rencana/program kerja, menghimpun dan menyiapkan hasil pengolahan data dan dokumentasi.

i. Kepala Dusun

Kepala dusun mempunyai tugas membantu kepala desa dalam menyelenggarakan pemerintahan, dan kemasyarakatan di wilayah kerjanya yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

B. Penyajian Data

1. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa tahun anggaran 2017-2019

Tabel 4.2

Anggaran Pendapatan dan Belanja Tahun 2017-2019

Tahun	Anggaran Pendapatan	Anggaran Belanja	Surplus/(Defisit)
2017	1.845.663.877	1.894.625.373	(48.961.496)
2018	1.778.106.048	1.718.428.002	(61.678.045)
2019	1.924.877.268	1.932.797.268	7.920.000
Jumlah	5.548.647.193	5.543.850.643	(102.719.541)

Sumber: Laporan Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Per Sumber dana pemerintah Desa Biji Nangka Tahun Anggaran 2017-2019

Berdasarkan pada tabel 4.2 diatas menggambarkan bahwa pada tahun 2017 sampai dengan tahun 2019 Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Biji Nangka Kabupaten sinjai lebih meningkat anggaran belanjanya dibandingkan anggaran pendapatannya.

Tabel 4.3

Realisasi Pendapatan dan Realisasi Belanja Tahun 2017-2019

Tahun	Realisasi Pendapatan	Realisasi Belanja	Surplus/(Defisit)
2017	1.845.663.879	1.856.053.565	(10.389.686)
2018	1.778.106.048	1.692.976.349	85.129.699
2019	1.925.057.902	1.885.809.080	39.248.822
Jumlah	5.548.827.829	5.434.838.994	113.988.835

Sumber: Laporan Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Per Sumber dana pemerintah Desa Biji Nangka Tahun Anggaran 2017-2019

Berdasarkan tabel 4.3 diatas menggambarkan bahwa pendapatan tahun 2017 sampai dengan tahun 2019 realisasi pendapatan dan belanja desa di Desa Biji Nangka kecamatan sinjai Borong lebih meningkatkan anggaran pendapatannya dibanding dengan anggaran belanjanya.

2. Pendapatan Desa

Pendapatan desa merupakan suatu penerimaan kas desa yang menambah ekuitas pada periode tahun anggaran yang bersangkutan dan menjadi hak pemerintah desa yang tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah desa (Siregar, 2015:13).



Tabel 4.4
Pendapatan Desa Tahun 2017-2019

No	Tahun	Jenis Pendapatan	Anggaran
1	2017	Pendapatan Asli Desa	66.175.000
2		Pendapatan Transfer	1.779.488.877
		Dana Desa	831.481.089
		Bagian dari hasil pajak	24.208.791
		Alokasi Dana Desa	923.798.997
3		Pendapatan Lain-lain	63.900.000
1	2018	Pendapatan Asli Desa	16.654.572
2		Pendapatan Transfer	1.728.412.563
		Dana Desa	813.661.000
		Bagian dari hasil pajak	27.746.706
		Alokasi Dana Desa	887.004.857
3		Pendapatan Lain-lain	989.400
1	2019	Pendapatan Asli Desa	2.039.600
2		Pendapatan Transfer	1.916.637.668
		Dana Desa	961.960.000
		Bagian dari hasil pajak	32.668.412
		Alokasi Dana Desa	922.009.249
3		Pendapatan Lain-lain	6.200.000
		Jumlah PAD 2017-2019	84.869.172
		Jumlah Pendapatan Transfer 2017-2019	5.424.539.108
		Jumlah Pendapatan Lain-lain 2017-2019	71.089.400
		Jumlah Pendapatan	5.580.497.680

Sumber: Laporan Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Per Sumber dana pemerintah Desa Biji Nangka Tahun Anggaran 2017-2019

C. Deskripsi Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu data realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa di Desa Biji Nangka Kecamatan sinjai Borong Kabupaten Sinjai.

Tabel 4.5
Perbandingan Anggaran Pendapatan Tahun 2017-2019

No	Tahun	Pendapatan	Anggaran	Tingkat Pertumbuhan
1	2017	Pendapatan Asli Desa	66.175.000	-
		Pendapatan Transfer	1.779.488.877	-
		Pendapatan Lain-lain	63.900.000	-
		Jumlah	1.909.563.877	-
2	2018	Pendapatan Asli Desa	16.654.572	(75%)
		Pendapatan Transfer	1.728.412.563	(3%)
		Pendapatan Lain-lain	989.400	(98%)
		Jumlah	1.746.056.535	(9%)
3	2019	Pendapatan Asli Desa	2.039.572	(88%)
		Pendapatan Transfer	1.916.637.668	11%
		Pendapatan Lain-lain	6.200.000	5,27%
		Jumlah	1.924.877.240	10%

Sumber: Laporan Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Per Sumber dana pemerintah Desa Biji Nangka Tahun Anggaran 2017-2019

Dilihat pada tabel 4.5 diatas menggambarkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa tahun anggaran 2017 sampai dengan tahun 2019. Pada tabel ini menjelaskan bahwa pendapatan asli desa mengalami penurunan di tahun

2018 dengan nilai sebesar 16.654.572 dari tahun 2017 dengan tingkat pertumbuhan (75%), dilihat pada tabel diatas bahwa pendapatan asli desa mengalami penurunan di setiap tahunnya. Kemudian pendapatan transfer juga mengalami penurunan dari nilai 1.779.488.877 tahun 2017 menjadi 1.728.412.563 di tahun 2018 dengan tingkat pertumbuhan (3%), dilihat pada tabel diatas bahwa pendapatan transfer mengalami penurunan dan peningkatan. Kemudian pendapatan lain-lain mengalami juga penurunan dari tahun 2017 dengan nilai 63.900.000 menjadi 989.000 di tahun 2018 dengan tingkat pertumbuhan (98%), dan pada tahun 2019 mengalami peningkatan dari nilai 989.000 tahun 2018 menjadi 6.200.000 di tahun 2019 dengan tingkat pertumbuhan 5,27%, dilihat pada tabel diatas bahwa pendapatan lain-lain mengalami penurunan dan peningkatan.



Tabel 4.6

Perbandingan Realisasi Pendapatan Tahun 2017-2019

No	Tahun	Realisasi Pendapatan	Anggaran	Tingkat Pertumbuhan
1	2017	Pendapatan Asli Desa	66.175.000	-
		Pendapatan Transfer	1.779.488.876	-
		Pendapatan Lain-lain	63.900.000	-
	Jumlah		1.909.563.877	-
2	2018	Pendapatan Asli Desa	49.959.145	(25%)
		Pendapatan Transfer	1.728.412.563	(3%)
		Pendapatan Lain-lain	989.400	(98%)
	Jumlah		1.779.361.108	(7%)
3	2019	Pendapatan Asli Desa	2.039.600	(96%)
		Pendapatan Transfer	1.916.637.668	11%
		Pendapatan Lain-lain	6.380.634	5,45%
	Jumlah		1.925.057.902	8%

Sumber: Laporan Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Per Sumber dana pemerintah Desa Biji Nangka Tahun Anggaran 2017-2019

Dilihat pada tabel 4.6 diatas menggambarkan realisasi pendapatan dan belanja desa tahun anggaran 2017 sampai dengan tahun 2019, pada tabel ini menjelaskan bahwa pendapatan asli desa mengalami penurunan di tahun 2018 dengan nilai 49.959.145 dari tahun 2017 dengan tingkat pertumbuhan (25%), pendapatan asli desa mengalami penurunan di tahun 2019 dengan nilai 2.039.600 dari tahun 2018 dengan tingkat pertumbuhan (96%), pada tabel ini pendapatan asli desa dari tahun 2017 sampai dengan 2019 mengalami penurunan di setiap tahunnya, pendapatan transfer juga

mengalami penurunan dari nilai 1.779.488.879 tahun 2017 menjadi 1.728.412.563 di tahun 2018 dengan tingkat pertumbuhan (3%), pendapatan transfer pada tahun 2019 mengalami peningkatan dari nilai 1.728.412.563 di tahun 2018 menjadi 1.916.637.668 di tahun 2019 dengan tingkat pertumbuhan 11%. Kemudian pendapatan lain-lain juga mengalami penurunan di tahun 2018 dengan nilai 989.000 dengan tingkat pertumbuhan (98%), pada tabel ini pendapatan lain-lain pada tahun 2017 sampai dengan tahun 2019 mengalami peningkatan dan penurunan.

Tabel 4.7
Persentase Anggaran Pendapatan dan Belanja Tahun 2017-2019

Tahun	Jumlah Anggaran Pendapatan (Rp)	Jumlah Realisasi Pendapatan (Rp)	Jumlah Surplus/Defisit (Rp)	Persentase (%)
2017	1.909.583.877	1.909.563.877	-	-
2018	1.746.056.535	1.779.361.108	33.304.573	2%
2019	1.924.877.240	1.925.057.902	180.662	0%

Sumber: Laporan Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Per Sumber dana pemerintah Desa Biji Nangka Tahun Anggaran 2017-2019

Dilihat pada tabel 4.7 diatas menggambarkan anggaran pendapatan dan belanja desa, mengalami peningkatan dan penurunan di setiap tahunnya, tidak bisa di pungkiri walau bagaimanapun semua desa pasti akan mengalami hal tersebut. Dalam 3 periode ini Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa mengalami penurunan dan peningkatan, pada tahun 2018 mengalami penurunan dengan nilai 1.746.056.535 dengan tingkat persentase 2%, kemudian di tahun selanjutnya mengalami peningkatan dengan nilai 1.924.877.240.



Gambar 4.3

Jumlah Anggaran Pendapatan Desa Biji Nangka Tahun 2017-2019

Gambar 4.3 diatas merupakan diagram dari anggaran pendapatan dari 3 periode yaitu tahun anggaran 2017-2019, dimana dapat dilihat pada diagram diatas bahwa anggaran pendapatan dari 3 periode mengalami penurunan dan peningkatan.



Gambar 4.4

Jumlah Realisasi Pendapatan Desa Biji Nangka Tahun 2017-2019

Pada gambar 4.4 diatas merupakan gambar diagram jumlah realisasi pendapatan desa selama 3 periode yaitu tahun anggaran 2017-2019, dimana dapat dilihat mengalami peningkatan dan penurunan.

Tabel 4.8

Perbandingan Anggaran Belanja Desa Tahun 2017-2019

No	Tahun	Jenis Belanja	Anggaran	Tingkat Pertumbuhan
1	2017	Bidang penyelenggaraan pemerintah desa	416.620.686	-
		Bidang pemberdayaan masyarakat	106.739.681	-
		Bidang pelaksanaan pembangunan desa	1.327.229.214	-
		Bidang pembinaan masyarakat	44.035.791	-
		Bidang belanja terduga	-	-
		Jumlah	1.894.625.372	-
2	2018	Bidang penyelenggaraan pemerintah desa	563.110.989	35%
		Bidang pemberdayaan masyarakat	34.015.000	(68%)
		Bidang pelaksanaan pembangunan desa	1.049.068.913	(21%)
		Bidang pembinaan masyarakat	70.233.100	59%
		Bidang belanja terduga	-	-
		Jumlah	1.716.428.002	(9%)
3	2019	Bidang penyelenggaraan pemerintah desa	618.854.935	10%
		Bidang pemberdayaan masyarakat	61.921.000	82%
		Bidang pelaksanaan pembangunan desa	1.132.702.718	8%
		Bidang pembinaan masyarakat	114.318.614	63%
		Bidang belanja terduga	-	-
		Jumlah	1.927.797.267	-12%

Sumber: Laporan Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Per Sumber dana pemerintah Desa Biji Nangka Tahun Anggaran 2017-2019

Pada tabel 4.8 diatas menggambarkan perbandingan anggaran belanja pada tahun 2017 sampai dengan tahun 2019. Dalam periode tahun 2017-2019 mengalami peningkatan dan penurunan, dimana pada bidang penyelenggaraan pemerintah desa dengan nilai 416.620.686 pada tahun 2017 meningkat pada tahun 2018 dengan jumlah nilai 563.110.989 dengan tingkat pertumbuhan 35%, dalam 3 periode ini bidang penyelenggaraan pemerintah desa mengalami peningkatan di setiap tahunnya. Kemudian bidang pembinaan masyarakat pada tahun 2017 dengan nilai 106.739.681 menurun pada tahun 2018 dengan nilai 34.015.000 dengan tingkat pertumbuhan (68%) dan pada tahun 2019 mengalami peningkatan dari tahun 2018 dengan tingkat pertumbuhan 10%. Selanjutnya bidang pelaksanaan pembangunan desa pada tahun 2017 dengan nilai 1.327.229.214 menurun pada tahun 2018 dengan nilai 1.049.068.913 dengan tingkat pertumbuhan (21%) dan pada tahun 2019 mengalami peningkatan dan tahun 2018 dengan tingkat persentase 8%. Pada bidang pembinaan masyarakat selama 3 periode mengalami peningkatan setiap tahunnya.

Tabel 4.9

Perbandingan Realisasi Belanja Desa Tahun 2017-2019

NO	Tahun	Jenis Belanja	Anggaran	Tingkat Pertumbuhan
1	2017	Bidang penyelenggaraan pemerintah desa	403.437.350	-
		Bidang pemberdayaan masyarakat	88.855.000	-
		Bidang pelaksanaan pembangunan	1.321.262.215	-
		Bidang pembinaan masyarakat	42.499.000	-
		Bidang belanja terduga	-	-
		Jumlah	1.856.053.565	-
2	2018	Bidang penyelenggaraan pemerintah desa	553.063.945	0,37%
		Bidang pemberdayaan masyarakat	32.409.000	(64%)
		Bidang pelaksanaan pembangunan	1.045.659.904	(21%)
		Bidang pembinaan masyarakat	61.843.500	46%
		Bidang belanja terduga	-	-
		Jumlah	1.692.976.349	(9%)
3	2019	Bidang penyelenggaraan pemerintah desa	596.206.680	8%
		Bidang pemberdayaan masyarakat	51.660.000	59%
		Bidang pelaksanaan pembangunan desa	1.126.407.400	9,64%
		Bidang pembinaan masyarakat	51.660.000	(16%)
		Bidang belanja terduga	-	-
		Jumlah	1.825.934.080	8%

Sumber: Laporan Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Per Sumber dana pemerintah Desa Biji Nangka Tahun Anggaran 2017-2019

Pada tabel 4.9 diatas menggambarkan perbandingan realisasi belanja desa tahun 2017 sampai dengan tahun 2018. Pada bidang penyelenggaraan pemerintah desa dengan nilai 403.437.350 pada tahun 2017 meningkat pada tahun 2018 dengan nilai 553.063.945 dengan tingkat pertumbuhan 37%, dalam 3 periode ini pada bidang penyelenggaraan pemerintah desa mengalami peningkatan setiap tahunnya. Pada bidang pemberdayaan masyarakat tahun 2017 dengan nilai 88.855.000 mengalami penurunan pada tahun 2018 dengan nilai 32.409.000 dengan tingkat pertumbuhan (64%) dan pada tahun 2019 mengalami peningkatan dari tahun 2018 dengan tingkat pertumbuhan 59%. Pada bidang pelaksanaan pembangunan desa tahun 2017 dengan nilai 1.321.262.215 mengalami penurunan pada tahun 2018 dengan nilai 1.045.659.904 dengan tingkat persentase (21%), pada tahun 2019 mengalami peningkatan dari tahun 2018 dengan tingkat pertumbuhan 9,64%. Selanjutnya pada bidang pembinaan masyarakat tahun 2017 dengan nilai 12.280.000 mengalami peningkatan di tahun 2018 menjadi 61.843.500 dengan tingkat pertumbuhan 46% dan pada tahun 2019 mengalami penurunan dengan tingkat pertumbuhan (16%).

Tabel 4.10

Persentase Jumlah Anggaran Belanja dan Jumlah Realisasi Belanja Tahun

2017-2019

Tahun	Jumlah Anggaran Belanja (Rp)	Jumlah Realisasi Belanja (Rp)	Jumlah Surplus/Defisit (Rp)	Persentase (%)
2017	1.894.625.372	1.856.053.565	(38.571.807)	(2%)
2018	1.716.428.002	1.692.976.349	(23.451.653)	(1%)
2019	1.927.797.267	1.825.934.080	(101.863.187)	(6%)

Sumber: Laporan Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Per Sumber dana pemerintah Desa Biji Nangka Tahun Anggaran 2017-2019

Dilihat pada tabel 4.10 diatas menggambarkan realisasi belanja dalam 3 periode, dalam realisasi belanja ini seringkali mengalami peningkatan maupun penurunan, dilihat pada tahun 2017 nilai realisasi belanja sebesar 1.856.053.565 menurun di tahun 2018 menjadi 1.692.976.349, kemudian di tahun 2019 mengalami peningkatan dengan nilai sebesar 1.825.934.080

D. Analisis Data

Anggaran pendapatan dan belanja desa merupakan suatu proses rencana keuangan tahunan pemerintah desa yang telah dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan badan permusyawaratan daerah yang ditetapkan dengan peraturan desa yang meliputi pendapatan, belanja, dan pembiayaan. Dengan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Desakebijakan desa dilaksanakan dalam berbagai program atau kegiatan karena anggarannya sudah ditentukan. Kegiatan pemerintah desa seperti pembangunan, perlindungan, dan

pelayanan kepada masyarakat dalam tahun berjalan, anggarannya sudah dirancang, dan pelaksanaannya sudah dapat dipastikan (Puspawardani,2017).

Tahap-tahap yang dilakukan dalam penilaian kinerja keuangan pemerintah desa Biji Nangka Kecamatan sinjai Borong dalam 3 periode yaitu dilakukan dengan cara analisis rasio keuangan yang terdiri atas 2 rasio yaitu: rasio kemandirian desa dan rasio efisiensi.

1. Rasio Kemandirian Desa

Rasio kemandirian keuangan desa merupakan kemampuan desa dalam membiayai sendiri kegiatan pemerintahan, pembangunan, dan pemberdayaan masyarakat. Kemandirian keuangan desa dilihat pada besar kecilnya pendapatan asli desa dibandingkan dengan pendapatan desa yang berasal dari sumber lainnya seperti dana bagi hasil, bagian dana perimbangan pusat dan daerah, bantuan keuangan pemerintah/provinsi/kabupaten/desa, Hibah, serta sumbangan dari pihak ketiga. Rasio kemandirian desa ditunjukkan dari besar kecilnya rasio kemandirian serta rasio ketergantungan desa terhadap sumber dan eksternal (Dari pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten/kota). Semakin tinggi rasio keuangan desa, maka tingkat ketergantungan terhadap pihak eksternal (terutama pemerintah pusat, provinsi, kabupaten, dan desa) semakin rendah dan sebaliknya (Sumarna,2017).

Berikut cara untuk menghitung rasio kemandirian desa:

$$\text{Rasio kemandirian desa} = \frac{\text{Pendapatan Asli Desa}}{\text{Pendapatan diluar Pendapatan Asli Desa}}$$

$$\text{Rasio kemandirian desa} = \frac{66.175.000}{1.843.388.877} = 3,59\%$$

$$\text{Rasio kemandirian desa} = \frac{16.654.572}{1.729.401.963} = 0,96\%$$

$$\text{Rasio kemandirian desa} = \frac{2.039.572}{1.922.837.668} = 0,11\%$$

Hasil perhitungan rasio kemandirian desa laporan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Biji Nangka Kecamatan sinjai Borong dalam 3 periode yaitu dari tahun anggaran 2017-2019 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 4.11

Perhitungan Rasio Kemandirian

Tahun	PAD	Pendapatan diluar PAD	Rasio Kemandirian	Kesimpulan
2017	66.175.000	1.843.388.877	3,59%	Rendah
2018	16.654.572	1.729.401.963	0,96%	Rendah
2019	2.039.572	1.922.837.668	0,11%	Rendah

Sumber: Laporan Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Per Sumber dana pemerintah Desa Biji Nangka Tahun Anggaran 2017-2019

Berdasarkan analisis perhitungan rasio kemandirian desa pada tabel diatas dapat dilihat bahwa kinerja keuangan pemerintah desa Biji Nangka Kecamatan sinjai Borong dalam 3 periode termasuk dalam kategori tidak mandiri karena tidak mencapai 75% ke atas. Dilihat pada

tahun 2017 rasio kemandirian sebesar 3,59% kemudian pada tahun 2018 rasio yang diperoleh 0,96% dan tahun selanjutnya yaitu tahun 2019 tingkat persentasenya sebesar 0,11%. Tingkat persentasenya menunjukkan bahwa kinerja keuangan pemerintah Desa Biji Nangka termasuk dalam kategori tidak mandiri. Dikatakan tidak mandiri karena tingkat kemandirian desa 29%-34%. Sedangkan 75% ketas termasuk kategori mandiri.

2. Rasio Efektivitas

Rasio ini menggambarkan kemampuan pemerintah desa dalam merealisasikan pendapatan asli desa (PADes) yang rencanakan dibandingkan dengan target yang ditetapkan berdasarkan potensi rill desa. Pemerintah desa dikatakan mampu menjalankan tugasnya apabila rasio yang dicapai minimal 1 sampai 100%, akan tetapi semakin tinggi rasio ini maka itu menunjukkan bahwa kemampuan desa semakin baik (Sumarna, 2017).

Berikut cara untuk menghitung rasio efektivitas:

$$\text{Rasio efektivitas} = \frac{\text{Realisasi penerimaan PADes}}{\text{Anggaran penerimaan PADes}}$$

$$\text{Rasio efektivitas} = \frac{66.175.000}{66.654.572} = 99\%$$

$$\text{Rasio efektivitas} = \frac{49.959.145}{16.654.572} = 30\%$$

$$\text{Rasio efektivitas} = \frac{2.039.600}{2.039.572} = 100\%$$

Hasil perhitungan rasio efektivitas laporan APBDes Desa Biji Nangka Kecamatan Sinjai dalam 3 periode yaitu dari tahun 2017-2019 dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 4.12
Perhitungan Rasio Efektivitas

Tahun	Realisasi Penerimaan PAD	Anggaran Penerimaan PAD	Rasio Efektivitas	Kesimpulan
2017	66.175.000	66.654.572	100%	Efektif
2018	49.959.145	16.654.572	30%	Tidak Efektif
2019	2.039.600	2.049.572	100%	Efektif

Sumber: Laporan Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Per Sumber dana pemerintah Desa Biji Nangka Tahun Anggaran 2017-2019

Berdasarkan analisis perhitungan rasio efektivitas pada tabel diatas dapat dilihat bahwa kinerja keuangan Pemerintah Desa Biji Nangka Kecamatan Sinjai Borong dalam 3 periode termasuk dalam kategori cukup efektif, karena dimana pada periode 2018 berada pada kategori tidak efektif dengan tingkat efektif dengan tingkat tingkat persentase 30% namun di tahun 2019 mengalami peningkatan efektif yang sangat drastis dengan tingkat rasio 100%. Dari hasil persentase yang tertera pada tabel diatas dapat disimpulkan bahwa kinerja keuangan Pemerintah Desa Biji Nangka sudah efektif, karena tingkat efektif 90%-100%.

E. Pembahasan

Sesuai dengan hasil analisis yang telah disusun dengan menggunakan dua analisis rasio yaitu rasio kemandirian desa, dan rasio efisiensi:

1. Rasio Kemandirian Desa

Sesuai dengan analisis rasio kemandirian desa dalam mengukur pendapatan desa Pemerintah Desa Biji Nangka Kecamatan Sinjai Borong tahun anggaran 2017-2019 termasuk dalam kategori tidak mandiri, dimana hasil analisis yang telah dilakukan menunjukkan bahwa analisis kemandirian desa ini dalam mengukur kinerja keuangan Pemerintah Desa Biji Nangka pada 3 periode yaitu tahun 2017 menunjukkan tingkat mandiri rendah dimana tingkat persentase rasio kemandirian desa sebesar 30%, di tahun 2018 tingkat rasio kemandirian desa mengalami peningkatan dengan jumlah persentase 34% kemudian di tahun anggaran selanjutnya mengalami penurunan dengan tingkat rasio kemandirian desa dengan jumlah persentase 33%.

2. Rasio Efektivitas

Sesuai dengan analisis rasio efektivitas dalam mengukur kinerja keuangan pemerintah Desa Biji Nangka Kecamatan Sinjai Borong tahun anggaran 2017-2019 termasuk dalam kategori tingkat cukup efektif. Dimana pada tahun anggaran 2017 tingkat rasio berada pada tingkat rasio efektif dengan nilai rasio 100%, kemudian di tahun selanjutnya mengalami penurunan yang sangat drastis yaitu berada pada tingkat rasio tidak efektif dengan nilai rasio 30% dan di tahun 2019 berada pada rasio efektif dengan nilai tingkat rasio 100%. Dapat disimpulkan bahwa

pemeintah desa dalam menjalankan tugasnya ditinjau dari rasio efektivitasnya sudah efektif.

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, terdapat bahwa pendapatan desa berpengaruh terhadap belanja desa. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian terdahulu, yaitu hasil penelitian Ratna Sari Dewi & Ova Novi Irama (2018) yang juga menemukan bahwa pendapatan desa berpengaruh langsung terhadap anggaran belanja desa.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah melakukan penelitian, maka peneliti dapat menyimpulkan beberapa kesimpulan yang dapat ditarik:

1. Bahwa sumber pendapatan yang terdiri dari Pendapatan Asli Desa, Pendapatan Transfer, dan Pendapatan Lain-lain, terdapat sumber pendapatan tertinggi dari pendapatan yaitu pendapatan transfer pada tahun 2019 dengan nilai 1.916.637.668. Hal ini menunjukkan bahwa pendapatan asli desa tidak mandiri karena tidak mencapai 75% keatas. Dilihat pada tahun 2017 rasio kemandirian sebesar 3,59% kemudian pada tahun 2018 rasio yang diperoleh 0,96% dan tahun selanjutnya yaitu tahun 2019 tingkat persentasenya sebesar 0,11%. Tingkat persentasenya menunjukkan bahwa kinerja keuangan pemerintah Desa Biji Nangka termasuk dalam kategori tidak mandiri.
2. Bahwa sumber pendapatan yang diperoleh digunakan untuk belanja desa dalam bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa, Bidang Pemberdayaan Masyarakat, bidang pelaksanaan pembangunan, bidang pembinaan masyarakat dan bidang belanja terduga. Terdapat belanja tertinggi yaitu pada bidang pelaksanaan pembangunan pada tahun 2017 dengan nilai 1.327.229.214. Hal ini menunjukkan bahwa biaya belanja sangat efisien karena menghasilkan tingkat rasio

kurang dari 60%. Ini mengartikan bahwa Pemerintah Desa Biji Nangka telah mampu merealisasikan pendapatan dengan baik.

B. Saran

Sesuai dengan hasil penelitian dan hal-hal yang terkait mengenai keterbatasan penelitian maka peneliti memberikan saran sebagai berikut:

1. Bagi Pemerintah
 - a. Pemerintah Desa Biji Nangka perlu meningkatkan kemandirian desa dengan cara meningkatkan Lain-lain Pendapatan Asli Desa.
 - b. Diharapkan kepada Pemerintah Desa Biji Nangka dapat terus mempertahankan efesiensi desa serta meningkatkan efektivitas desanya.
2. Bagi peneliti selanjutnya
 - a. Diharapkan agar lebih meningkatkan penelitian yang berkaitan dengan pendapatan dan belanja desa serta lebih meambah rasio-rasio keuangan yang digunakan dalam menganalisis APBDes.

DAFTAR PUSTAKA

- Aulia, M. R. (2016). *Analisis Pengelolaan Dana Desa Pada Pemerintahan Desa di Kecamatan V Koto Kampung Dalam Kabupaten Padang Pariaman Tahun Anggaran 2015*, (Online), (<https://etd.unsyiah.ac.id>, diakses 10 April 2020).
- Dewi, R.S, Irama, O.N., (2018). *Pengaruh Pendapatan Desa dan Alokasi Dana Desa Terhadap Belanja Desa dan Kemiskinan di Kantor Badan Pusat Statistik Sumatera Utara*. *Jurnal Riset Akuntansi Multiparadigma (JRAM)*, (Online), Vol. 5, No. 2, (<https://jurnal.uisu.ac.id>, diakses 02 Maret 2020).
- Faradibha, L, Diana, N., (2018). *Akuntabilitas Pemerintahan Desa Dalam Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDES) di Desa Banjarsari Kecamatan Bandar kedungmulyo-Jombang*. *Jurnal Ilmiah Riset Akuntansi*, (Online), Vol. 7, No. 7, (<http://riset.unisma.ac.id>, diakses 29 April 2020).
- Irma. (2015). *Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) Di Kecamatan Dolo Selatan kabupaten Sigi*. *Jurnal Katalogis*, (Online), Vol, 3. No. 1. (<http://jurnal.untad.ac.id>, diakses 10 April 2020).
- Liando, Y.L, Lambey, L., & Wokas, H.RN. (2017). *Analisis Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa di Desa Kolongan Kecamatan Kombi Kabupaten Minahasa*. *Jurnal EMBA*, (Online), Vol. 5, No. 2, (<http://ejournal.unsrat.ac.id>, diakses 23 April 2020).
- Mafzatun, C., Rahman, B, & Andirfa, M. (2017). *Pengaruh Kebijakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Gampong Terhadap Pembangunan Infrastruktur Pada Gampong Baloy Kecamatan Blang Mangat Kota Lhokseumawe*. *Jurnal Akuntansi Dan Pembangunan*, (Online). Vol. 3, No. 2. (<http://ejournalstielhokseumawe.com>, diakses 29 April 2020).
- Octavianti, Putri. (2017). *Peranan Kepala Desa Dalam Mengelola Sumber-Sumber Pendapatan Desa Di Desa Laboi Jaya Kecamatan Bangkinang Kabupaten Kampar*, (Online), (<http://repository.uin-suska.ac.id/id/eprint/17267/>, diakses 28 April 2020).
- Sumarna (2017). *Analisis Laporan Keuangan Desa Ciburial Tahun Anggaran 2013- 2014*. (Online), (<https://ciburial.desa.id/kinerja-keuangan-pemerintahan-desa-ciburial/>, diakses 23 April).
- Undang-Undang Republik Indonesia No. 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa.*
- Undang-Undang Republik Indonesia No. 32 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah.*

Undang-Undang Republik Indonesia No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa.

Undang-Undang Desa Pasal 72 Ayat (1) Tentang Sumber Pendapatan Desa.





LAMPIRAN

LAMPIRAN 1

Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) di Desa Biji Nangka Kecamatan Sinjai Borong

1. Laporan Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Per Sumber Dana Desa Biji Nangka Tahun Anggaran 2017
2. Laporan Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Per Sumber Dana Desa Biji Nangka Tahun Anggaran 2018
3. Laporan Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Per Sumber Dana Desa Biji Nangka Kecamatan Sinjai Borong 2019



LAMPIRAN 2

Analisis Perhitungan APBDes Desa Biji Nangka Kecamatan Sinjai Borong

Tahun Anggaran 2017-2019

1. Perhitungan Rasio Kemandirian Desa APBDes Desa Biji Nangka Kecamatan Sinjai Borong Tahun Anggaran 2017-2019

Tahun	PAD	Pendapatan diluar PAD	Rasio Kemandirian	Kesimpulan
2017	66.175.000	1.843.388.877	3,59%	Rendah
2018	16.654.572	1.729.401.963	0,96%	Rendah
2019	2.039.572	1.922.837.668	0,11%	Rendah

Sumber: Laporan Realisasi Pelaksanaan APBDes Per Sumberdana
Pemerintah Desa Biji Nangka Tahun Anggaran 2017-2019

2. Perhitungan Rasio Efektivitas APBDes Desa Biji Nangka Kecamatan Sinjai Borong Tahun Anggaran 2017-2019

Tahun	Realisasi Penerimaan PAD	Anggaran Penerimaan PAD	Rasio Efektivitas	Kesimpulan
2017	66.175.000	66.654.572	99%	Efektif
2018	49.959.145	16.654.572	30%	Tidak Efektif
2019	2.039.600	2.049.572	100%	Efektif

Sumber: Laporan Realisasi Pelaksanaan APBDes Per Sumberdana
Pemerintah Desa Biji Nangka Tahun Anggaran 2017-2019

LAMPIRAN 3

Wawancara

ANALISIS PENDAPATAN DAN BELANJA DESA DI DESA BIJI NANGKA KECAMATAN SINJAI BORONG

Daftar pertanyaan serta hasil atau jawaban dari tiap-tiap pertanyaan:

1. Bagaimana kondisi kemandirian Desa Biji Nangka dari tahun Anggaran 2017-2019, apakah sudah mencapai tingkat mandiri yang diharapkan?

Jawab:

Kondisi Kemandirian Desa Biji Nangka disetiap tahunnya mengalami surplus dan setiap desa pasti mengalami hal tersebut. Bisa dikatakan tingkat kemandirian Desa Biji Nangka... pada tingkat tidak mandiri, karena pendapatan asli desa semakin menurun setiap tahunnya.

2. Bagaimana Perkembangan tingkat efisien Desa Biji Nangka dari tahun anggaran 2017-2019?

Jawab:

Tingkat efisien dalam 3 periode ini Desa Biji Nangka berada pada tingkat sangat efisien karena anggaran belanja sangat berpengaruh terhadap perealisasiian belanja.

DOKUMENTASI PENELITIAN



Foto saat wawancara



Foto Saat Wawancara



Foto saat Pengambilan Data



Foto Saat Pengambilan Data



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Nomor : 367/05/C.4-II/IX/42/2020

Makassar, 25 september 2020 M

Lamp. : -

Hal : Permohonan Izin Penelitian

Kepada Yth.

Kantor Desa Biji Nangka, kecamatan Sinjai Borong, kabupaten Sinjai
di-

Tempat

Dengan hormat,

Dalam rangka proses penelitian dan penulisan skripsi mahasiswa di bawah ini :

Nama : Sunarti

Sambuk : 105721113816

Jurusan : MANAJEMEN

Judul Penelitian : Analisis Pendapatan Dan Belanja Desa (Studi Kasus Pada Kantor Desa Biji Nangka Kecamatan Sinjai Borong)

Dimohon kiranya mahasiswa tersebut dapat diberikan izin untuk melakukan penelitian sesuai tempat mahasiswa tersebut melakukan penelitian.

Demikian permohonan kami, atas perhatian dan bantuannya diucapkan terima kasih.



Ismail Rasulong SE, MM.

Tembusan :

1. Rektor Unismuh Makassar
2. Ketua Jurusan
3. Mahasiswa Ybs.
4. Arsip



PEMERINTAH KABUPATEN SINJAI
KECAMATAN SINJAI BORONG
DESA BIJI NANGKA

SURAT KETERANGAN

No. 400/37.06.155 / BN, SB

Yang bertanda tangan dibawah ini, Kepala Desa Biji Nangka Kecamatan Sinjai Borong Kabupaten Sinjai menerangkan bahwa

Nama : Sunarti
Stambuk : 105721113816
Tempat Tgl Lahir : Sinjai, 16 April 1999
Pekerjaan : Mahasiswa Universitas Muhammadiyah Makassar
Alamat : Jl. Benteng Somba Opu, Jenne Tallasa Kab. Gowa

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa yang namanya tersebut diatas benar adalah Mahasiswa Universitas Muhammadiyah Makassar dan telah melaksanakan kegiatan Penelitian tentang Analisis Pendapatan Dan Kemangan Desa di Desa Biji Nangka, Kecamatan Sinjai Borong, Kabupaten Sinjai sejak tanggal 26 September sampai 16 November 2020

Demikian surat keterangan ini dibuat dengan sebenarnya dan dapat dipergunakan seperlunya.

Biji Nangka, 16 November 2020

Kepala Desa Biji Nangka

